

BANK INDONESIA SEBAGAI BUKTI PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA

Ayu Nadira Wulandari¹, Lilis Putri Simamora², Tasya Rahmadani³, Galih Raka Siwi⁴

Email: simamoralilis275@gmail.com², tasyarahmadani556@gmail.com³,
galihrakasiwi638@gmail.com⁴

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Bank Indonesia sebagai bukti peninggalan kolonial Belanda dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan pustaka. Artikel ini terutama membahas latar belakang sejarah Bank Indonesia, dengan penekanan khusus pada pendiriannya sebagai bank sentral sesudah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. De Javasche Bank, merupakan bank Belanda yang digunkakan untuk bank sirkulasi di Hindia Belanda pada masa kolonial, diangkat sebagai Bank Sentral setelah KMB. Pendiriannya oleh pemerintah Belanda dimaksudkan untuk memperoleh kontrol atas sirkulasi uang dan mendukung perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Artikel ini juga membahas perubahan peran Bank Indonesia selama masa pendudukan Jepang, dan Nederlansche Indische Cieciele Adminitrafic (NICA) serta proses nasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951. Selanjutnya, artikel membahas perkembangan Bank Indonesia setelah nasionalisasi, termasuk penyatuan dengan Bank Negara Indonesia dan perubahan struktur perbankan pada tahun 1968. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan sebuah pencapaian besar dalam mewujudkan otonomi bank sentral di Indonesia. Lebih lanjut, esai ini memberikan analisis mengenai susunan hierarki dan tanggung jawab Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Utara, dengan penekanan khusus pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang berkedudukan di Medan. Artikel tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai visi, misi, dan tujuan strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menekankan keterlibatan aktif kantor dalam penerapan kebijakan moneter, pengelolaan sistem perbankan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci : Bank Indonesia, Peninggalan kolonial Belanda.

ABSTRACT

This article discusses the role of Bank Indonesia as evidence of Dutch colonial legacy using qualitative research methods and a literature approach. The article mainly discusses the historical background of Bank Indonesia, with special emphasis on its establishment as the central bank after the Round Table Conference in 1949. De Javasche Bank, a Dutch bank used as a circulation bank in the Dutch East Indies during the colonial period, was appointed as the Central Bank after the RTC. Its establishment by the Dutch government was intended to gain control over money circulation and support Dutch companies in the Dutch East Indies. The article also discusses the changing role of Bank Indonesia during the Japanese and Nederlansche Indische Cieciele Adminitrafic (NICA) occupation and the nationalization process of De Javasche Bank in 1951. Furthermore, the article discusses the development of Bank Indonesia after nationalization, including the merger with Bank Negara Indonesia and the changes in the banking structure in 1968. The passing of Law No. 23/1999 on Bank Indonesia was a major achievement in realizing central bank autonomy in Indonesia. Furthermore, this essay provides an analysis of the hierarchical structure and responsibilities of Bank Indonesia in North Sumatra Province, with special emphasis on the Bank Indonesia Representative Office based in Medan. The article provides a comprehensive overview of the vision, mission and strategic objectives of the Representative Office of Bank Indonesia in North Sumatra Province. It emphasizes the office's active involvement in implementing monetary policy, managing the banking system, and supporting regional economic growth.

Keywords : Bank Indonesia, Dutch colonial legacy.

PENDAHULUAN



Gambar 1.
Bank Indonesia

Gedung tersebut dikenal dengan Gedung BI (Bank Indonesia). Medan, sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, adalah rumah bagi bangunan bersejarah yang terpelihara dengan baik yang menampilkan peninggalan kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang pada tahun 1906 oleh arsitek Hulswit, Fermont, dan Cuypers. Letaknya di Jalan Balai Kota No. 4, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.

Terletak di Cremerweg atau kini disebut Jalan Balaikota. Sejak awal, bangunan ini diperuntukkan sebagai Bank, yakni Bank Jawa (Javasche Bank) yang menjadi embrio Bank Indonesia ketika kemerdekaan. Bangunan ini memiliki menara bertutup kubah berwarna hitam, dan rancang bangunnya mirip dengan Townhall of Medan yang persis di sebelah kirinya. Pada saat ini, bank ini masih berfungsi yang disebut dengan Bank Indonesia perwakilan Kota Medan dan Sumatera Utara. Hingga kini, bangunan ini masih terawat dengan baik. Di belakangnya, dibangun pencakar langit yang berfungsi sebagai Bank Indonesia.

Proyek pembangunan selesai dalam satu tahun. Dengan nama De Javasche, gedung ini digunakan sebagai pusat keuangan Belanda sejak tahun 1907. L. Vonhemert menjabat sebagai manajer pertama bank tersebut ketika resmi didirikan di Medan. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat Bank Belanda sejak didirikan hingga kekalahan Belanda.

Struktur ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa yang mencerminkan ciri-ciri periode waktu tersebut. Bangunan ini memiliki kubah di bagian atas, atau atab, dan selesai dalam waktu satu tahun sebelum bagian atasnya dibongkar pada tahun 1956. Dulunya, De Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang berlokasi di Medan. Namun demikian, Kantor Cabang Tanjung Pura dan Tanjung Balai ditutup akibat krisis ekonomi global pada tahun 1930an.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menasionalisasi seluruh bangunan peninggalan Belanda enam tahun setelah Indonesia merdeka. Akibatnya seluruh harta milik Belanda, termasuk gedung bank Belanda di Medan ini disita dan dijadikan milik negara. Gedung pemerintahan yang terawat baik di Belanda ini masih berdiri hingga saat ini. Perbaikan signifikan selesai pada tahun 2000.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka. Analisis dokumen sejarah, laporan resmi, dan literatur terkait digunakan untuk membentuk gambaran menyeluruh tentang peran Bank Indonesia dalam konteks sejarah ekonomi Indonesia.

Kami juga melakukan riset langsung ke lapangan untuk meneliti gaya arsitektur di bagian depan bank Indonesia yang ada di Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2.
Bank Indonesia

Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia berperan penting bagi perekonomian negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah Bank Indonesia dan bagaimana perannya sebagai bukti peninggalan kolonial Belanda yang akan dibagi menjadi 5 pembahasan. Titik balik pendirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral terjadi setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag. KMB memutuskan De Javasche Bank, sebuah bank Belanda, sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank sendiri didirikan pada masa kolonial untuk mengatur sirkulasi uang di Hindia Belanda.

Pemerintah Belanda mula-mula menginginkan De Javasche Bank menjadi perpanjangan tangan bank-bank yang hadir di Hindia Belanda. Ia beroperasi sebagai bank sirkulasi dan memonopoli penerbitan uang kertas. Bank ini beroperasi hingga tahun 1942, ketika seluruh bank pemerintah Hindia Belanda diambil alih oleh tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bank Negara Indonesia dibentuk untuk memegang peran sebagai bank sirkulasi dan bank pembangunan. Namun, Konferensi Meja Bundar menetapkan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral, yang kemudian menimbulkan kontroversi dan keinginan untuk nasionalisasi.

Pada Juli 1951, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk nasionalisasi De Javasche Bank dengan melakukan negosiasi pembelian saham. Bank ini kemudian diubah namanya menjadi Bank Indonesia. Proses nasionalisasi ini sejalan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka untuk memiliki bank sirkulasi dan bank sentral yang mendukung pembangunan. Setelah nasionalisasi, Bank Indonesia terus berkembang. Pada tahun 1965, bersama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Indonesia dilebur menjadi Bank Negara Indonesia. Namun, perkembangan tidak berhenti di sini. Sejumlah undang-undang dibentuk untuk mengatur sektor perbankan, yang melibatkan berbagai bank lain.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menandai langkah penting dalam menjaga kemandirian bank sentral di Indonesia. Hal ini mengukuhkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX, yang awalnya Kantor Cabang Medan, memiliki sejarah panjang sejak dibuka pada tanggal 30 Juli 1907. Perkembangan cabang ini mencerminkan perjalanan panjang Bank Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Sumatera Utara.

Struktur organisasi Bank Indonesia Medan mencerminkan perannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan divisi-divisi seperti Advisory Ekonomi dan Keuangan, Pengembangan Ekonomi, serta SP dan PUR, kantor ini berfokus pada penyediaan informasi berkualitas, pengembangan sektor riil, dan layanan pembayaran.

PEMBAHASAN

SEJARAH BERDIRINYA BANK INDONESIA

Sejarah perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Untuk mencapai dan menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam menghasilkan uang legal, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengendalikan efisiensi sistem pembayaran, mengawasi perbankan, dan bertindak sebagai lender of last resort. De Javasche Bank dinobatkan sebagai bank sentral setelah Bank Negara Indonesia pertama kali dimaksudkan sebagai bank sentral namun akhirnya berorientasi sebagai bank pembangunan, sesuai dengan resolusi Konferensi Meja Bundar (RTC) tahun 1949 di Den Haag. Perasaan kuat dan keinginan agar De Javasche Bank dinasionalisasi tergugah dengan keputusan ini.

Proses nasionalisasi dimulai pada Juli 1951 dengan negosiasi pembelian saham-saham De Javasche Bank, yang kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia. Selanjutnya, melalui serangkaian Undang-undang (UU) pada tahun 1968, terjadi restrukturisasi perbankan dengan berdirinya berbagai bank pemerintah, termasuk Bank Negara Indonesia.

Pemerintah Belanda mula-mula menginginkan De Javasche Bank menjadi perpanjangan tangan bank-bank yang hadir di Hindia Belanda. Bank ini beroperasi sebagai bank sirkulasi dan mempunyai hak eksklusif untuk mencetak uang kertas. Bank ini beroperasi hingga tahun 1942, ketika seluruh bank pemerintah Hindia Belanda diambil alih oleh tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bank Negara Indonesia dibentuk untuk memegang peran sebagai bank sirkulasi dan bank pembangunan. Namun, Konferensi Meja Bundar menetapkan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral, yang kemudian menimbulkan kontroversi dan keinginan untuk nasionalisasi. Pada Juli 1951, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk nasionalisasi De Javasche Bank dengan melakukan negosiasi pembelian saham. Bank ini kemudian diubah namanya menjadi Bank Indonesia. Proses nasionalisasi ini sejalan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka untuk memiliki bank sirkulasi dan bank sentral yang mendukung pembangunan.

Dampak dari Berdirinya Bank Indonesia Di Kota Medan

Pasca nasionalisasi, Bank Indonesia terus melakukan ekspansi. Bank Indonesia diserap ke dalam Bank Negara Indonesia pada tahun 1965 bersama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Namun, kemajuan terus berlanjut setelah titik ini. Untuk mengendalikan industri perbankan, beberapa undang-undang yang mempengaruhi berbagai bank.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai peranan penting dalam menjaga otonomi bank sentral Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi jaringan pembayaran dan merumuskan kebijakan moneter. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX yang awalnya bernama Kantor Cabang Medan memiliki sejarah penting sejak didirikan pada tanggal 30 Juli 1907. Pertumbuhan cabang ini menunjukkan sejarah panjang Bank Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah di Sumatera Utara. Struktur organisasi Bank Indonesia Medan mencerminkan fungsinya dalam melaksanakan kewajibannya. Kantor ini berdedikasi untuk memberikan informasi berkualitas tinggi, perkembangan sektor riil, dan layanan pembayaran. Bagian-bagiannya meliputi Penasihat Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan Ekonomi, serta SP dan PUR.

Status Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia masih berupaya untuk meningkatkan sektor riil dan sektor keuangan perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan zaman. Awalnya merupakan kantor cabang kesebelas De Javasche Bank, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX memainkan peran penting dalam membantu Bank Indonesia dalam inisiatif regionalnya. Kantor ini berkomitmen untuk

menjadikan dirinya sebagai organisasi yang andal dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Memiliki visi, misi, dan tujuan strategis yang jelas.

Pada era modern ini, Bank Indonesia terus beradaptasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, artikel ini akan menjelajahi lebih dalam mengenai peran dan kontribusi Bank Indonesia, khususnya kantor perwakilan di wilayah Sumatera Utara, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia.

Gaya arsitektur Dari Bank Indonesia Di Kota Medan

Desain arsitektur bangunan ini mengingatkan pada arsitektur umum Eropa pada masa itu, seperti yang terlihat dari kubah di atasnya. Kubah tersebut dibongkar pada tahun 1956 dan dipasang kembali pada tahun 2002 sebagai bagian dari proyek perbaikan besar. Lonceng pemberian Tjong A Fie, seorang pedagang terkenal dan tokoh berpengaruh pada komunitas Tionghoa awal tahun 1900-an di Kota Medan, juga disimpan di menara tersebut.

De Javasche Bank, sebuah lembaga keuangan Belanda di Medan, sebelumnya bertempat di struktur ini. Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura dibuka masing-masing pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908, setelah kantor tersebut didirikan pada tanggal 30 Juli 1907. Namun Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura terpaksa ditutup karena akibat krisis ekonomi global pada tahun 1930an. Presiden Soekarno menasionalisasi De Javasche Bank setelah negaranya merdeka, dan bank tersebut kemudian mengadopsi nama Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Sentral tahun 1953, Bank Indonesia beroperasi sebagai bank umum selain bank sentral. Setelah modifikasi ini, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia Medan dan masih beroperasi hingga saat ini.

Jam kakek asli Belanda yang terletak di dalam ruangan telah salah tempatnya. Jam berukuran besar tersebut telah diubah menjadi logo Bank Indonesia berukuran besar. Warna biru pada lambang BI melambangkan keutuhan langit dan lautan nusantara yang menghubungkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melambangkan persatuan dan kesatuan.

Logo Bank Indonesia berawal dari logo De Javasche Bank dan telah mengalami proses transformasi yang kompleks dan ekstensif. Pada awal pendiriannya, logo bank mengalami modifikasi dari desain De Javasche Bank dengan mengganti huruf J dengan huruf I dengan tetap menjaga unsur lainnya tidak berubah.

Logo Bank Indonesia mengalami transformasi agar sesuai dengan standar estetika kontemporer dan menampilkan citra yang kuat dan berwibawa seperti saat ini. Logo De Javasche Bank yang digambarkan bukanlah logo resmi, melainkan logo yang terlihat pada mata uang yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank.

Fungsi Bank Indonesia atau De Javache Bank

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang peranan utama bank yaitu menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat.

Peran utama perbankan Indonesia adalah sebagai fasilitator pengumpulan dan distribusi pendapatan pemerintah. Bank memainkan peranan penting dalam perolehan dan distribusi kredit, serta dalam bidang keuangan, investasi, pengambilan simpanan, penciptaan uang, dan penyediaan layanan tambahan, seperti penyimpanan barang-barang berharga.

Bank menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat, seperti memfasilitasi pembelian dan penjualan surat berharga, menerbitkan wesel, menawarkan penyimpanan yang aman untuk barang-barang berharga, menerbitkan saham dan obligasi, membantu dalam pengambilan keputusan asuransi, memberikan jaminan, dan menawarkan informasi dan referensi.

Tujuan dan tugas De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi terus berkembang sesuai

dengan piagam yang diberikan pemerintah secara berkala. De Javasche Bank diberikan monopoli eksklusif dalam penerbitan uang kertas. Selain itu, ia melakukan operasi komersial seperti menerima simpanan, memberikan kredit, memproses wesel, dan memperdagangkan emas dan perak batangan. Keberhasilan De Javasche Bank tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas yang diterbitkan. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan tiga batasan pada De Javasche Bank, khususnya yang berkaitan dengan kemampuannya berinvestasi di perusahaan, memberikan kredit tanpa jaminan yang memadai, dan terlibat dalam pembelian dan penjualan sahamnya sendiri. Selain itu, De Javasche Bankwet 1922 mengamanatkan tanggung jawab khusus kepada De Javasche Bank, termasuk memberikan layanan kepada pemerintah secara gratis. De Javasche Bank berperan sebagai perantara pemerintah dalam penerbitan uang kertas dan obligasi negara dalam perannya sebagai Pemegang Kas Negara. Istilah "De Javasche Bank" dapat digunakan untuk menggambarkan bank kredit yang menerbitkan surat utang. Dengan diberlakukannya De Javasche Bankwet tahun 1922, pemerintah mulai membatasi hak eksklusif De Javasche Bank sebagai satu-satunya bank sirkulasi di Hindia Belanda. Sebelum menerapkan kebijakan moneter, De Javasche Bank diharuskan meminta bimbingan dari pemerintah Belanda.

Mata Uang yang dikeluarkan De Javache Bank

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perekonomian moneter Indonesia berada dalam kondisi kurang optimal. Bank Indonesia memperkirakan pada saat itu terdapat sekitar 4 miliar rupiah uang pendudukan Jepang yang beredar, yang antara lain disebabkan oleh inflasi. Setelah Proklamasi tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengakui ketidakmampuannya untuk menetapkan mata uangnya sendiri. Akibatnya, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang menetapkan tiga jenis mata uang yang tetap berlaku sementara di Indonesia, yaitu Uang yang dicetak oleh Javasche Bank, Pemerintah Hindia Belanda, dan uang Jepang yang beredar. Pada masa penjajahan di Indonesia, Jepang tidak mencantumkan nomor seri pada uang kertasnya; sebaliknya, mereka menggunakan karakter 'kode' seperti SG dan SI. Uang kertas yang dicetak oleh Javasche Bank atau pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki nomor seri, berbeda dengan yang dicetak oleh lembaga lain. Selain itu, perlu dicatat bahwa dokumen tersebut tidak memiliki tanda tangan dari individu atau organisasi yang berwenang, dan tidak menyertakan bagian apa pun yang berisi instruksi tentang cara mengidentifikasi barang palsu.

Mata uang yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda terdiri dari uang kertas dan koin. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, ini diproduksi oleh de Javasche Bank sebagai bank peredaran utama dan pemerintah Hindia Belanda. Uang kertas yang dicetak oleh de Javasche Bank dapat diklasifikasikan menjadi lima bentuk uang yang berbeda.

- a. Bank Kopergeld dengan satuan gulden (10, 200, 300, dan 1000), dan ricipis (25, dan 500).
- b. Bank sen Coen dengan satuan gulden (5, 10, 25, 200, 300, dan 1000).
- c. Bank sen Gedung dengan satuan gulden (5, 10, dan 40).
- d. Bank sen Wawang dengan satuan gulden (5, 25, 200, dan 1000).
- e. Bank Ned Indie Muntbiljet dengan satuan gulden (2112, dan 1) (Arta Suaka, tt: 12-13)

Mata uang yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagian besar terdiri dari koin logam yang terbuat dari perak, perunggu, nikel, dan tembaga. Uang logam tersebut berdenominasi dalam beberapa satuan antara lain dait, bonk xniver, duit stuiver, double dhuit, gulden, stuiver, dull cent, cenistuk, dan cent (Wiratsongko, 10-12).

Berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1828 oleh Pemerintah Hindia Belanda menandai lahirnya Bank Indonesia. Pada periode itu, De Javasche Bank memperkenalkan Gulden dan Sen sebagai bentuk mata uang. Keduanya hanya bekerja di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 142, penjajah Jepang menyusup dan selanjutnya menghentikan peredaran mata uang Belanda.

KESIMPULAN

Artikel ini menyoroti evolusi Bank Indonesia sebagai Bank yang tidak hanya memantau perubahan ekonomi namun juga menjadi simbol perlawanan terhadap kemunduran kolonial. Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 menjadi isu krusial. Pendirian De Javasche Bank sebagai Bank Sentral mencerminkan sejarah yang kompleks, dimana pendirian bank tersebut didorong oleh pemerintah Belgia untuk menerapkan deregulasi mata uang di Belgia. upaya ilmiah untuk mengakhiri skandal bank kolonial Belgia di industri perbankan Indonesia

Pembentukan dan pertumbuhan Bank Indonesia yang mengutamakan nasionalisasi, termasuk mergernya dengan Bank Negara Indonesia pada tahun 1965, menggarisbawahi komitmen terhadap adaptasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan amandemenperaturan perbankan, khususnya Peraturan No. 23 Tahun 1999, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencapai dariperekonomian, menjaga nilai Rupiah, dan meningkatkan sistem pembayaran. Peraturan perbankan, khususnya Peraturan No. 23 Tahun 1999, memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencapai stabilitas perekonomian, menjaga nilai Rupiah, dan meningkatkan sistem pembayaran. Komite Bank Indonesia, yang awalnya bernama Komite Cabang Medan, mendukung Bank Indonesia dalam memberikan keamanan di tingkat regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, A. W. (2017). Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 2(1), 56-79.
- Lubis, I. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan. USUpres.
- Erma, E. (2014). DARI DE JAVASCHE BANK MENJADI BANK INDONESIA: STUDY KASUS BANK INDONESIA CABANG PADANG 1953-1970. TINGKAP, 10(2), 130-141.
- NAWAWI, A. (2023). PERANCANGAN BANGUNAN KANTOR BANK INDONESIA DENGAN KONSEP VERNAKULAR KOLONIAL (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Bekasi).
- Sinambela, Y. P. P., & Nareswari, A. (2020). Karakter Visual Kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan Leli Nurlaeli, januari 2024, Perkembangan Uang sebagai Alat Pembayaran dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi di Indonesia: Tinjauan Pustaka, vol 01, No 01
- Alex Anis Ahmad,2022, Dari Mata Uang Kolonial ke Mata OeangRepublik Indonesia, vol 5 No 1
- Erond L damanik,2022, Historic Inner -city Area dimedan.